

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek/ Subjek Penelitian

Kabupaten Konawe Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Konawe, yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kabupaten Konawe Utara. Luas Wilayah Kabupaten Konawe Utara yaitu 5.101,76 Km² atau 13,40% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Asera dengan perkiraan sekitar 16,92% dari total luas Kabupaten Konawe Utara. Kabupaten Konawe Utara mempunyai beberapa sungai besar yang cukup potensial untuk pengembangan pertanian, irigasi dan pembangkit listrik seperti Sungai Lasolo, Sungai Kokapi, Sungai Toreo, Sungai Andumowu, Sungai Molawe, Sungai Lembo, Sungai Anggomate dan Sungai Linomoyo.

Ibukota Kabupaten Konawe Utara adalah Wanggudu yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Konawe Utara. Konawe Utara memiliki 159 Desa, 13 Kelurahan dan 2 UPT. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk SP2010, jumlah penduduk di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2018 sebesar 62.403 jiwa. Terjadi kenaikan sebesar 2,5% dari tahun 2017. Komposisi penduduk Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 32.720 jiwa laki-laki dan 29.683 jiwa perempuan, dengan rasio jenis sebesar 110,23. Sekitar 43% penduduk Konawe Utara bekerja di sector pertanian, kehutanan, dan perikanan, di mana sektor tersebut merupakan lapangan pekerjaan terbesar.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang-orang atau lembaga untuk tujuan-tujuan lain daripada tujuan lain yang sedang diteliti oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari BPS.

3.3 Metode Analisis

Model analisis dalam penelitian ini adalah Model Deskriptif dengan penelitian Kuantitatif dan Kualitatif yaitu dengan analisa data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode analisa secara deskriptif yang berisi pemaparan yang di dapat dari hasil analisa terhadap data sekunder.

3.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi per tahun dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$g_t = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

G_t = Laju pertumbuhan ekonomi (rate of growth)

t = Tahun tertentu

$t-1$ = Tahun sebelumnya

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi rata-rata dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$\bar{g} = \frac{g_1 + g_2 + g_3 \dots \dots \dots g_n}{n}$$

dimana:

\bar{g} adalah laju pertumbuhan ekonomi pertumbuhan rata-rata

1,2,3n adalah tahun pengamatan

3.3.2 Tipologi Klassen

Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Pertumbuhan PDRB yang dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB pusat dan pendapatan perkapita daerah yang dibandingkan dengan pendapatan perkapita pusat adalah dua indikator utama yang digunakan dalam analisis tipologi klassen.

Terdapat empat klasifikasi yang dibagi dalam analisis tipologi klassen yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh (High growth and high income), daerah maju tapi tertekan (high income but low growth), daerah berkembang cepat (high growth but low income) dan daerah relatif tertinggal (low growth and low income). Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah adalah sebagai berikut:

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (High growth and high income) yaitu daerah yang memiliki laju pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita lebih tinggi dari laju pertumbuhan PDRB pusat dan pendapatan perkapita pusat.
2. Daerah maju tapi tertekan (high income but low growth) yaitu daerah yang

memiliki laju pertumbuhan PDRB lebih rendah daripada laju pertumbuhan PDRB pusat, namun memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi daripada pendapatan perkapita pusat.

3. Daerah berkembang cepat (high growth but low income) yaitu daerah yang memiliki laju pertumbuhan PDRB lebih tinggi daripada laju pertumbuhan PDRB pusat, tetapi memiliki pendapatan perkapita lebih rendah daripada pendapatan perkapita pusat.
4. Daerah relatif tertinggal (low growth and low income) yaitu daerah yang memiliki laju pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita lebih rendah dari laju pertumbuhan PDRB pusat dan pendapatan perkapita pusat.

Untuk melihat lebih jelas bagaimana pengelempokkan menurut Tipologi Klassen maka dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut :

Pendapatan Perkapita \ Laju Pertumbuhan	Laju Pertumbuhan Diatas Rata-Rata	Laju Pertumbuhan Dibawah Rata-Rata
	Pendapatan Perkapita Diatas Rata-Rata	Daerah Maju
Pendapatan Perkapita Dibawah Rata-Rata	Daerah Berkembang	Daerah Relatif Terbelakang

GAMBAR 3.1

Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Tipologi Klassen Berdasarkan Laju Pertumbuhan dan Pendapatan Perkapita

3.3.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, Pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Interpretasi nilai IPM semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, dalam arti semakin mendekati nilai 100, maka semakin bagus tingkat pembangunan manusia di daerah tersebut sesuai dengan kriteria nilai suatu daerah.

TABEL 3.1
Skala Interval Indeks Pembangunan Manusia

Nilai	Keterangan
$IPM < 50$	Rendah
$50 < IPM < 80$	Sedang
$IPM > 80$	Tinggi

Sumber : BPS 2018

3.3.4 Analisis Kinerja Kemampuan Fiskal

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolak ukur yang kan digunakan dalam teknik analisis ini adalah :

3.3.4.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD menggunakan skala interval sebagaimana terlihat dalam sebagai berikut :

TABEL 3.2
Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Tinggi
>40,01	Sangat Tinggi

Sumber : Wulandari (2001)

Derajat desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

3.3.4.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Formula rasio kemandirian adalah sebagai berikut

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$$

TABEL 3.3

Pola Hubungan dan Skala Interval Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian (%)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Pola Hubungan
0% - 25 %	Sangat Rendah	Instruktif
25% - 50 %	Rendah	Konsultatif
50% - 75%	Sedang	Partisipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber : Halim (2007)

Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

3.3.4.3 Rasio Keserasian Belanja Daerah

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Halim 2007) :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut :

TABEL 3.4
Skala Interval Keserasian Belanja Keuangan Daerah

Keserasian Belanja Keuangan Daerah	Rasio (%)
Sangat Rendah	0-20
Rendah	20-40
Sedang	40-60
Tinggi	60-80
Sangat Tinggi	80-100

Sumber : Batafor (2011)

3.3.4.4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan

pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

TABEL 3.5
Skala Interval Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Halim (2007)